

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara Islam dan negara selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Karena Indonesia belum merdeka, pertanyaan apakah Islam berperan dalam negara sudah dimulai. Pada awal berdirinya Indonesia, hal yang paling mendasar adalah menyepakati konstitusi negara. Hampir semua orang dari BPUPKI (Badan Pemeriksa Pendahuluan Otonomi) memilih tipe Republik. Namun, para founding fathers akhirnya sepakat bahwa Republik Indonesia bukanlah negara teokrasi, melainkan negara di mana Islam dan kehidupan Islam sangat dijunjung tinggi setelah diskusi panjang tentang tempatnya dalam kehidupan bernegara. kawasan lindung sesuai dengan pasal 29 UUD 1945.<sup>1</sup>

Kesepakatan bahwa Republik Indonesia bukanlah negara teokratis tidak hanya memberikan hak kepada umat Islam di Indonesia untuk secara tegas mentaati syariat Islam, tetapi juga memberikan hak tersebut kepada mereka. Wacana sekuler Indonesia terus menguat. Sepanjang 100 tahun ke-20, umat Islam Indonesia menghadapi kesulitan besar dari arus modernisasi dan sekularisasi yang cepat yang mengubah beberapa bagian penting dari kerangka politik mereka yang ketat. Di sisi lain, adalah fakta bahwa Islam memperoleh pengaruh dan partai politik dan gerakan Muslim terus bermunculan. Dalam politik dan masyarakat Indonesia, dialektika antara sekularisasi dan Islamisasi—kedua proses yang terjadi secara bersamaan—terus menjadi isu utama.<sup>2</sup>

Politik Indonesia pada 1950-an adalah hubungan antara Islam dan dasar-dasar negara Indonesia. Umat Islam umumnya terbagi dalam dua kategori, mereka yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dan mereka yang memberikan model negara sekuler. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksananya ajaran Islam di masyarakat.<sup>3</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal umat Islam, khususnya di Indonesia, golongan modernis dan tani, memiliki sistem politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), h. 728

<sup>2</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, h. 729

<sup>3</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, h. 730

tujuan dan cita-cita politik Islam. Kaum modernis khususnya adalah pembela demokrasi, bertanggung jawab untuk menentang gerakan politik otoriter Sukarno di akhir 1950-an yang kemudian mengarah pada demokrasi terpimpin.<sup>4</sup>

Demokrasi terarah, meskipun didirikan oleh Sukarno yang karismatik, tidak bertahan lama karena tidak memiliki pijakan yang kokoh dan tidak dapat hidup selamanya. Lima atau enam tahun kemudian, otokrasi hancur total, dan komunis yang mendukungnya mengalami nasib yang sama.<sup>5</sup>

Di awal orde baru, para aktivis Islam optimis bisa kembali berperan dalam politik nasional, mengingat kontribusinya dalam menggulingkan rezim orde lama. Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari masa penjajahan atau penjajahan Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan dari orde lama, orde baru hingga masa Reformasi (sekarang).<sup>6</sup>

Era orde lama membawa masyarakat Indonesia ke dalam rezim pemerintahan otoriter yang memiliki berbagai produk hukum konservatif dan mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih sentralistik melalui pengawasan ketat pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Kepemimpinan Orde Lama, dari pemerintahan Presiden Sukarno hingga penggantinya Presiden Suharto, mengubah tatanan politik dan manajemen pemerintahan di Indonesia, sehingga dinamakan Orde Baru. Pada masa-masa awal pemerintahan Suharto, ia mencanangkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) berkesinambungan, dengan harapan Indonesia akan mencapai tahap yang matang (*mature society*), dan kemudian berkembang menjadi negara yang adil dan makmur.<sup>7</sup>

Di era orde baru, pemerintah menekankan stabilitas nasional dalam politik dalam negeri, dan untuk mencapai stabilitas nasional harus terlebih dahulu dimulai dengan mencapai konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional *Pertama*, mencerminkan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD

---

<sup>4</sup> Analisis Jurnal Studi Ke-Islaman, *Islam, Negara dan Hak-hak Minoritas di Indonesia*, ISSN: 2008-9046. Vol. XII, No. 1, Juni 2012. Diterbitkan: IAIN Raden Intan Lampung, 2012, h. 50.

<sup>5</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 285

<sup>6</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 286.

<sup>7</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 287.

1945 secara murni dan konsisten. Akibat pertama disebut juga dengan akibat pertama. Yang *kedua* adalah mencapai mufakat tentang pelaksanaan mufakat utama, dan pemerintah partai politik dan rakyat telah membentuk mufakat kedua. Berdasarkan semangat konsensus nasional, pemerintah Orde Baru mampu memberikan tekanan politik kepada partai-partai yang memiliki basis massa yang luas dengan menyaring partai-partai untuk menyederhanakan jumlah partai dalam pemilu.<sup>8</sup>

Runtuhnya kekuasaan Suharto pada tahun 1998 oleh gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa melawan pemerintah menawarkan secercah harapan untuk lingkungan demokrasi yang lebih baik. Pemerintahan B.J. Sejak Suharto menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie mulai membentuk kabinet untuk pembangunan dan reformasi, yang melembagakan kebijakan seperti kebebasan berbicara sipil dan perlindungan keamanan melalui penerapan nomor urut politik. narapidana, kebebasan pers, pembentukan partai politik dan percepatan pemilu 1999-2003. Pemutusan hubungan organisasi ABRI dengan Partai Golkar dan jarak yang sama dari partai-partai yang ada, dan netralitas ABRI dalam pemilu.<sup>9</sup>

Hari-hari awal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah yang paling sibuk, dan Presiden Abdurrahman Wahid tampaknya melihat beberapa masalah yang membutuhkan penyelesaian segera. Ia sendiri memiliki banyak rencana yang harus dilakukan dalam jangka pendek, mulai dari pemulihan ekonomi berkelanjutan yang belum selesai untuk menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat, hingga ancaman disintegrasi di berbagai bidang, peran "domestikisasi". Militer, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, membuka ruang bagi keterlibatan dan otonomi masyarakat yang lebih luas dengan meminimalkan keterlibatan negara.<sup>10</sup>

Pada tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden ke-4 Indonesia menggantikan pemerintahan Habibie yang hanya bertahan selama 1 tahun setelah jatuhnya Suharto. Abdurrahman Wahid membuat banyak terobosan dalam memajukan kaum minoritas. Misalnya, mengizinkan larangan

---

<sup>8</sup> Tulay, & Girard, *The Role of Demographics on The Susceptibility to Social Influence*, 2010, h. 9

<sup>9</sup> Tulay, & Girard, *The Role of Demographics on The Susceptibility to Social Influence*, 2010, h. 10.

<sup>10</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontest Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 287

perayaan Imlek pada masa Suharto, menyerukan pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme. Hal ini cukup kontroversial karena PKI (berkaitan dengan Marxisme-Leninisme) dihitamkan pada masa Suharto. Abdurrahman Wahid telah membuat banyak terobosan dalam mempromosikan minoritas. Misalnya, mengizinkan larangan perayaan Imlek pada masa Suharto, menyerukan pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme. Hal ini cukup kontroversial karena PKI (berkaitan dengan Marxisme-Leninisme) dihitamkan pada masa Suharto. Dengan memberikan keadilan kepada minoritas, Abdurrahman Wahid menunjukkan adanya kesetaraan di antara warga negara. Selama masa jabatannya yang singkat, Abdurrahman Wahid sering melakukan perjalanan ke luar negeri, bertujuan untuk menjalin hubungan kerja sama antar negara. Abdurrahman Wahid juga berdamai dengan Israel, terus mendukung Palestina dan menegakkan kebebasan beragama.<sup>11</sup>

Begitu juga Islam. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Secara sosiologis, kemampuan umat Islam sebagai sumber legitimasi bagi institusi politik dalam konteks pembangunan dan keberhasilan nasional sangatlah besar. Dalam setiap pemilu, citra Islam selalu dihadirkan dengan prinsip-prinsip tertentu. Ajaran Islam mencakup kehidupan politik negara dan cocok dengan sistem nilai lain, meninggalkan sekularisasi politik umat Islam tidak ada waktu untuk berhasil.

Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan kepada umat manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai rasul. Ajaran yang dibawa oleh Islam pada hakikatnya tidak hanya tercermin dalam satu aspek saja, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sumber berbagai ajaran adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Islam selaku sistem pengajaran agama pula ialah sistem pembelajaran, serta banyak teori- teori pembelajaran yang murni bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Perihal ini dipaparkan dalam Al- Quran selaku berikut:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Artinya: "Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". (Q.S.Al-Alaq:5).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Tulay & Girard, *The Role of Demographics on The Susceptibility to Social Influence*, 2010, h. 22

<sup>12</sup> Ade Wahidin, The Concept of Ulama in the Quran, Al-Tadabbur, *Journal of the Quran and Tafsir Science*, t.t, h. 30

Firman Allah Swt dalam Q. S. Yunus ayat 101 dijelaskan sebagai berikut:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ  
وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: Katakanlah “perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”. (Q.S. Yunus:101).<sup>13</sup>

Sejak lahirnya Islam, Islam telah menjadi dasar utama penyebarannya. Islam berusaha untuk mengenal Allah SWT. Dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Bertemu Allah SWT. Hal ini dapat dipahami sebagai rasa percaya diri dan melayani diri sendiri yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Juga mengenal Allah SWT, tujuan utama penyebaran Islam, termasuk di negara ini.

Hubungan antara Islam dan negara telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama, khususnya cendekiawan Muslim, serta ulama yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam, topik pembicaraan merupakan hal yang wajar karena risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan hukum yang bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>14</sup>

Politik Islam tidak terlepas dari agama sebagai nilai dan intinya. Misalnya, Islam dapat dipahami sebagai fenomena agama, budaya dan politik. Fondasi semua mazhab politik yang di dalamnya Islam berkembang selalu terkait atau jauh dari agama karena faktor-faktor di luar landasan agama itu sendiri. Ini adalah kumpulan fakta yang harus diterapkan oleh pengikutnya, dan bagaimana menerapkannya. Prinsip-prinsip pendekatan ini telah digariskan dalam Al-Qur'an. Islam sebagai alat politik bukan hanya tatanan agama tetapi merupakan cara hidup yang sempurna bagi individu, masyarakat, bangsa dan bangsa.<sup>15</sup>

Menurut Abdurrahman Wahid, umat Islam tidak wajib mendirikan negara Islam. Namun, ada perintah dalam Al-Qur'an

<sup>13</sup> Ade Wahidin, The Concept of Ulama in the Quran, Al-Tadabbur, hal. 42

<sup>14</sup> Kholis Setiawan M.Nur. (2012). *Pribumi Al-Qur'an: Tafsir Wawasan Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantarah. 106-107

<sup>15</sup> Moh Dahlan, *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*, h. 41

untuk membangun masyarakat yang mengacu pada praktik keutamaan amar ma'ruf (membangun kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kejahatan) dalam rangka menegakkan iman dan keadilan di muka bumi. Oleh karena itu, Islam tidak dapat direduksi menjadi negara, tetapi harus kembali sebagai agama.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa para pemikir politik Islam, merujuk pada Munawir Syadzali, tidak mencari model ideal bentuk negara Islam, tetapi lebih menekankan penggunaan bentuk negara yang ada. Selama umat Islam dapat sepenuhnya mengembangkan kehidupan keagamaan mereka, latar belakang pemerintahan mereka tidak lagi menjadi pusat pemikiran. Atas dasar kerangka tersebut, Abdurrahman Wahid secara sadar berpegang pada sila tunggal Pancasila dengan persetujuan ulama dari organisasi yang dipimpinya. Abdurrahman Wahid sendiri meyakini bahwa pemerintahan yang berideologi Pancasila adalah negara damai yang harus dijaga.<sup>17</sup>

Politik adalah aktivitas nyata manusia dalam kehidupan dunia, dipahami tidak hanya sebagai penyelesaian tugas duniawi, tetapi juga sebagai pengejaran kepentingan nyata yang berorientasi jangka pendek. Amalan ini diberi muatan religius, yakni nilai-nilai agama dan moral, sehingga politik menemukan realitas sejatinya sebagai cerminan tanggung jawab (misi) manusia, baik manusiawi maupun ilahi.<sup>18</sup>

Menurut penjelasan di atas, Islam dipandang berbeda dari banyak agama lain, dan seperti yang ditunjukkan Joachim Wach, dalam Islam tidak ada perbandingan antara gereja dan negara dalam agama Kristen abad pertengahan karena dalam Islam tidak pernah ada hal seperti itu. tubuh) belum lagi konstitusi *agama hierarkis*.<sup>19</sup> Marshall Hodgson melihat seluruh sejarah Islam sebagai petualangan (usaha) tanpa akhir untuk mencapai masyarakat ideal yang melibatkan umat Islam dalam praktik semua bidang kehidupan, termasuk politik. Menurut Houston Smith, partisipasi dalam politik

---

<sup>16</sup> Ali Mansyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 93

<sup>17</sup> Ali Mansyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, h. 94.

<sup>18</sup> Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya dan Politik (Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan)*, (Yogyakarta: Sypress, 2010), h. 42

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, Kata Pengantar dalam Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 11., dan Lihat Joachim Wach, *The Comparative Study of Religion*, ed, Joseph M. Kitagawa, (New York and London: Columbia University Press, 2010), h. 4.

merupakan manifestasi dari energi atau kekuasaan yang diperoleh umat Islam melalui ketaatan dan ketaatan kepada Tuhan.<sup>20</sup>

Dari agama-agama yang ada di dunia ini, mungkin hanya Islam yang erat kaitannya dengan politik yang menunjukkan salah satu ciri perkembangan sejarah. Menurut Muhammad Asad, dia menekankan bahwa tidak mungkin kita menilai Islam dengan benar tanpa perhatian yang memadai pada politik. Berbicara tentang kehidupan Nabi Muhammad di Madinah.<sup>21</sup> Pola hubungan komunitas Muslim dan komunitas non Muslim yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam bentuk konstitusi atau disebut Piagam Madinah merupakan contoh konkret untuk tidak berlebihan menggarapnya sebagai modal keterkaitan Islam dengan politik. Pernyataan asad di atas sejalan dengan Abubdurrahman Wahid. Ia juga memiliki pandangan yang senada tentang piagam Madina.<sup>22</sup>

Banyak orang yang melihat sosok Abdurrahman Wahid yang luar biasa kemudian mempelajari dan menulis tentang kiprah Abd Rahman Wahid di berbagai daerah di bawah kekuasaannya. Selain sebagai contoh, ini juga untuk menyadarkan pikiran seorang tokoh yang meninggal dunia pada 30 Desember 2009. Salah satu buku yang membahas tentang pemikiran Islam Abdurrahman Wahid adalah Faisol *The Prisma of Political Thought Abdurrahman Wahid*. Dalam buku ini Faisol mencoba menghadirkan Abdurrahman Wahid dari perspektif Islam. Pembahasan dimulai dengan konsep dasar Islam kemudian menjelaskan Islam dan negara secara umum. Bab selanjutnya menyajikan biografi Abdul Rahman Wahid dan karya-karyanya, bab inti menjelaskan Islam menurut definisi Abd Rahman Wahid, mulai dari definisi, kurikulum hingga konsep-konsep pendidikan yang relevan diterapkan di Indonesia.<sup>23</sup>

Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa isu utama dalam hubungan antaragama adalah membangun saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. Indonesia hanya bisa menjadi negara yang kuat di mana orang-orang yang berbeda agama bisa saling memahami, tidak hanya saling menghormati. Yang dibutuhkan adalah rasa memiliki, bukan hanya toleransi satu sama lain.

---

<sup>20</sup> Marshall Hodgson, *The Venture of Islam: concience and history in uned civilation*, ( Jakarta: Paramadina, 2012 ), h. 110

<sup>21</sup> Muhammad Asad, *Pemerintahan dan Azas-azasnya, dalam Salim Azzam (ed), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 70.

<sup>22</sup> Muhammad Asad, *Pemerintahan dan Azas-azasnya, dalam Salim Azzam (ed), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, h. 8.

<sup>23</sup> Faisol, “*Gus Dur dan Pendidikan Islam*”, (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2017), h.

Toleransi antar umat beragama harus tercermin dalam kehidupan nyata. Semua partai politik di kalangan umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa memiliki di antara semua anggota masyarakat bangsa kita, karena hanya dengan itu, Islam dapat tumbuh menjadi kekuatan pelindung bagi semua lapisan masyarakat di seluruh negeri.<sup>24</sup>

Konsep kodrat manusia adalah sikap kodrat manusia untuk tujuan mencapai keridhaan Tuhan. Untuk mencapai keridhoan Tuhan yang menjadi landasan dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap satu pihak yang sering terjadi di wilayah negara yang majemuk seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme berdasarkan aqidah atau teologi akan melahirkan pemahaman agama yang humanistik. Oleh karena itu, agama dapat membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

Berdasarkan uraian di atas, mengkaji pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan negara. Maka peneliti memunculkan skripsi dengan **judul “Islam dan Negara (Analisis Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menggambarkan masalah utama yang menjadi perhatian penelitian. Identifikasi dan fokus penelitian merupakan fase yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena penelitian kualitatif tidak dimulai dengan sesuatu yang kosong atau tanpa kasus, baik dari pengalaman peneliti maupun dari literatur ilmiah. Jadi menekankan penelitian kualitatif itu sendiri adalah masalah inti.

Peneliti yang akan dilakukan akan difokuskan pada relasi antara Islam dan Negara, dimana Islam yaitu agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan sedangkan Negara adalah sebuah organisasi yang berada di atas kelompok maupun beberapa kelompok individu yang mendiami suatu wilayah atau teritori tertentu bersama dan mengakui adanya sebuah pemerintahan yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sebuah kelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. Berdasarkan pandangan peneliti, hubungan antara Islam dan negara terkait dengan keadaan Islam politik di era Abdul Rahman Wahid dan hubungannya dengan era saat ini.

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, h. 16



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan foku penelitian di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana hubungan Islam dan negara ?
2. Bagaimana hubungan Islam dan negara menurut K. H. Abdurrahman Wahid ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan Islam dan negara
2. Untuk mengetahui hubungan Islam dan negara menurut K.H. Abdurrahman Wahid

### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan masyarakat luas. Manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan  
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya konsep-konsep tentang pemikiran politik Islam, yang dapat diterapkan dalam kehidupan politik.
  - b. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi oleh peneliti selanjutnya dan dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam kaitannya dengan konsep pemikiran politik Islam.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis tentang konsep pemikiran politik Islam sehingga dapat dijadikan pedoman.
  - b. Lembaga Pendidikan  
Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas sistem politik yang ada dan dapat diterapkan pada politik sebagai tambahan informasi dan pertimbangan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan membantu memberikan garis besar struktur penelitian sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami

dan memahami setiap bagian skripsi. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, penulis secara sistematis menguraikan penulisan skripsi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal

Bagian pertama terdiri dari sampul, sampul dalam, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bagian ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi tentang jenis dan metode, topik penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan dan pembahasan bab ini berisi deskripsi objek, dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan, saran-saran dan penutup .

3. Bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.